

FIKSI SEBAGAI CERMIN REALITAS: EKSPERIMEN HIBRIDA DALAM FILM KRONIK PURIWICARA

Riza Pahlevi

Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia

Email: riza@isi.ac.id

ABSTRAK

Film Kronik Puriwicara merupakan karya sinematik yang diciptakan melalui pendekatan penelitian artistik sebagaimana dikemukakan Christopher Frayling (1993) dalam kerangka *research through art*, di mana proses kreatif menjadi sarana eksplorasi konseptual dan empirik. Karya ini berangkat dari fenomena sosial-politik Indonesia yang merefleksikan relasi antara kekuasaan dan moral publik, diolah melalui bentuk drama musikal sebagai eksperimen hibrida antara fiksi dan realitas. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana hibriditas fiksi dan realitas berfungsi sebagai strategi artistik dalam membangun kesadaran kritis, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan metode penciptaan film berbasis riset. Sejumlah penelitian terdahulu, seperti kajian Riksa Belasunda (2014) terhadap Opera Jawa, menyoroti hibriditas bentuk dalam film musikal; namun belum banyak yang menelaah hibriditas konseptual antara fiksi dan realitas politik dalam konteks riset penciptaan. Celah tersebut menjadi dasar penelitian ini. Hipotesis awal menyatakan bahwa percampuran fiksi dan realitas mampu menciptakan jarak reflektif bagi audiens dalam memahami isu kekuasaan. Hasil penciptaan menunjukkan bahwa penggabungan narasi politik dengan kemasan musikal melahirkan bentuk hibriditas estetika yang efektif mengaktifkan dimensi etika dan reflektif dalam sinema. Implikasi penelitian ini membuka kemungkinan bagi praktik penciptaan film selanjutnya yang menjembatani seni, kritik sosial, dan kesadaran politik.

Kata kunci: fiksi, realitas, hibriditas, film, politik

Pendahuluan

Perkembangan sosial politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala menarik. Peristiwa politik tidak lagi dipahami hanya sebagai informasi faktual, tetapi hadir sebagai ruang imajinasi yang memengaruhi cara publik melihat kekuasaan. Tokoh politik menjadi bagian dari budaya populer. Percakapan tentang perebutan kekuasaan muncul di media sosial, televisi, bahkan dalam dialog sehari-hari. Situasi ini membuka peluang bagi pencipta film untuk membaca ulang dinamika kekuasaan dengan jarak yang lebih tenang dan reflektif.

Film Kronik Puriwicara dibuat dengan semangat itu. Alih-alih menampilkan politik secara realistis, film ini menempatkan cerita dalam dunia fiksi berupa kerajaan modern. Konflik keluarga menjadi pintu masuk untuk membahas ambisi, tanggung jawab publik, dan moralitas. Pendekatan ini memberikan ruang ekspresi yang lebih bebas. Fiksi memadatkan isu nyata dan memberi simbol-simbol yang mudah dikenali tanpa terikat pada figur tertentu. Pendekatan fiksi sebagai medium representasi politik ini sejalan dengan teori semiotika yang menekankan bagaimana realitas politik dikonstruksi dan direpresentasikan melalui simbol dan narasi dalam media visual (Fiske, 1990).

Fiksi sebagai Cermin Realitas: Eksperimen Hibrida dalam Film Kronik Puriwicara

Sebagai film musikal, *Kronik Puriwicara* mencoba cara berbeda dalam membicarakan kekuasaan. Musik dan lirik menjadi saluran bagi tokoh untuk mengekspresikan hal-hal yang sulit disampaikan dalam dialog biasa. Irama dan koreografi membuat konflik politik terasa lebih cair. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa musik merupakan media efektif untuk mengungkap kritik sosial dan aspirasi kolektif karena kemampuannya menyajikan pesan moral dan sosial secara emosional serta estetis (Rusnianto, 2023; Santoso, 2025). Penelitian ini mengadopsi pendekatan *research through art* yang memandang proses artistik bukan hanya sebagai kreasi estetis, tetapi juga sebagai metode pemahaman dan refleksi fenomena sosial-politik, sesuai kajian seni kontemporer sebagai ruang advokasi dan partisipasi publik (Lestari, 2025).

Sebagaimana yang dibahas oleh Rahmah et al. (2025), dalam film dan media visual, konstruk karakter sering kali digunakan untuk menggambarkan nilai moral yang dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Dalam *Kronik Puriwicara*, karakter-karakter seperti Dewi dan Panji tidak hanya berfungsi sebagai tokoh protagonis atau antagonis, tetapi juga sebagai simbol dari pertarungan nilai moral dalam politik.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses kreatif pembuatan *Kronik Puriwicara* sebagai eksperimen hibrida antara fiksi dan realitas politik. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana bentuk musikal dapat memperhalus kritik sosial serta bagaimana hibriditas estetika membuka ruang reflektif bagi penonton.

Teori dan Metodologi

Penelitian ini menggunakan kerangka *research through art* yang dikembangkan oleh Frayling (1993), yang menempatkan proses kreatif sebagai medium pencarian pengetahuan di mana keputusan artistik tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan pemahaman pencipta terhadap isu sosial yang diolah. Pendekatan ini menegaskan bahwa praktik seni merupakan cara empiris dan reflektif untuk mengkaji fenomena sosial melalui ekspresi artistik.

Konsep hibriditas yang dikemukakan oleh García Canclini (1995) dan Bhabha (1994) membantu menjelaskan bagaimana film ini memadukan dua ranah berbeda. Fiksi memberikan kebebasan untuk mengolah fenomena politik tanpa kekhawatiran melanggar konteks sensitif, sementara realitas menyuntikkan kedalaman untuk menjaga relevansi cerita dengan kondisi sosial-politik aktual. Interaksi keduanya menghasilkan bentuk hibrida yang tidak sepenuhnya fiksi dan bukan pula representasi langsung, menciptakan ruang estetis yang produktif dan reflektif bagi penonton.

Proses penciptaan film ini berjalan melalui empat tahap yang mengikuti logika penelitian artistik sebagaimana diuraikan oleh Sullivan (2005). Tahap eksplorasi berfungsi untuk mengumpulkan fenomena, referensi visual, musikal, dan gagasan awal sebagai dasar konseptual. Eksperimen artistik merupakan fase pencarian bentuk terbaik melalui pendekatan visual, musikal, dan dramatik yang inovatif. Produksi menjadi momen

evaluasi dan pengujian atas berbagai keputusan kreatif yang diambil, sedangkan refleksi merupakan tahap rekapitulasi yang menilai keselarasan antara bentuk film yang dihasilkan dengan tujuan awal penciptaan dan kontribusi artistik terhadap pemahaman sosial.

Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, penelitian ini memperkuat fondasi konseptual serta metodologisnya dalam menjembatani seni, kritik sosial, dan studi budaya.

Hasil dan Pembahasan

Film *Kronik Puriwicara* adalah sebuah karya sinematik yang menggabungkan elemen-elemen fiksi dengan realitas sosial dan politik Indonesia. Film ini menggunakan setting fiksi dalam bentuk "kerajaan modern" yang seolah menempatkan sistem politik kerajaan sebagai kerangka cerita, namun dengan elemen-elemen yang sangat familiar bagi audiens Indonesia. Fiksi ini memberikan kebebasan bagi pengembangan narasi, namun tetap mempertahankan relevansi dengan realitas politik yang ada.

Salah satu contoh yang paling mencolok dalam film adalah bagaimana pengumuman Raja Puriwicara XI mengenai Reza Mahardika yang akan menggantikan posisi wali kota, serta Dewi dan Panji yang akan maju melalui pemilihan umum. Konflik yang muncul dari pengumuman ini mencerminkan dinamika yang sering terjadi dalam politik Indonesia, yaitu peralihan kekuasaan yang tidak selalu berdasarkan merit atau keinginan rakyat, melainkan karena ikatan keluarga atau pertimbangan pragmatis lainnya. Pemilihan umum dalam film ini menunjukkan bagaimana sistem demokrasi, meskipun ada unsur kompetisi, tetap bisa dikendalikan oleh kekuasaan yang lebih besar, yakni raja. Ini mencerminkan praktek politik dinasti yang kerap ditemukan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, di mana calon kepala daerah sering kali berasal dari keluarga atau kelompok yang sudah memiliki kekuasaan sebelumnya (Mariana, 2017).

Film ini juga menggambarkan bagaimana manipulasi politik terjadi melalui praktik suap dan politik uang. Salah satu adegan yang paling jelas menggambarkan hal ini adalah ketika Panji Wiratama membagikan photocard kepada warga sebagai bagian dari kampanyenya. Namun, dalam konteks film, photocard ini bukan hanya sekadar media promosi, melainkan juga mengandung uang sebagai bentuk suap. Ini adalah representasi yang jelas dari politik uang yang masih merajalela dalam pemilihan umum di Indonesia. Praktik semacam ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga memperlemah kualitas demokrasi itu sendiri, sebagaimana yang dilaporkan oleh berbagai lembaga pengawas pemilu dan anti-korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Dalam kehidupan nyata, politik uang sering digunakan oleh calon kepala daerah untuk memenangkan suara dengan cara yang tidak sah, yang menggambarkan bagaimana kekuasaan politik dapat dibeli dengan uang, mirip dengan yang digambarkan dalam film ini.

Fiksi sebagai Cermin Realitas: Eksperimen Hibrida dalam Film Kronik Puriwicara

Selain itu, film juga menunjukkan adanya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Panji untuk kepentingan pribadi. Dalam salah satu adegan, Pengawas Keuangan mengungkapkan bahwa Panji pernah memintanya untuk mengubah laporan keuangan kerajaan dan mengalihkan uang makan para penjaga untuk digunakan dalam aktivitas perjudian. Hal ini sangat mirip dengan praktik korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah, di mana pejabat sering kali melakukan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa sektor pemerintahan daerah merupakan salah satu yang paling banyak melibatkan kasus korupsi, baik itu dalam bentuk mark-up anggaran, suap dalam pengadaan barang/jasa, atau pemanfaatan anggaran untuk kepentingan pribadi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Fiksionalisasi praktik korupsi melalui manipulasi laporan keuangan dalam film ini menciptakan kesadaran akan masalah struktural yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Penyimpangan anggaran, manipulasi dokumen, dan pengalihan dana publik untuk kepentingan pribadi mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan kontrol dalam pemerintahan. Hal ini terjadi tidak hanya pada level pejabat tinggi, tetapi juga dapat melibatkan pejabat daerah yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran publik untuk kesejahteraan rakyat.

Seperti yang dijelaskan oleh Agung dan Syahdanendra (2025) dalam kajian mereka terhadap karakter Homelander dalam *The Boys*, ambiguitas moral dalam karakter dapat menciptakan ketegangan yang menarik dalam cerita. Hal yang serupa juga terjadi dalam *Kronik Puriwicara*, di mana tokoh-tokoh politik, meskipun terlihat berpihak pada kebaikan, sering kali menunjukkan sisi gelap mereka, seperti dalam tindakan manipulasi dan politik uang yang dilakukan oleh Panji.

Selain itu, film ini juga memperlihatkan bagaimana gender dan patriarki berperan dalam politik. Dalam interaksi antara Dewi dan Panji, terdapat dialog yang merendahkan posisi Dewi sebagai wanita yang dianggap tidak mampu untuk memimpin. Panji menyarankan agar Dewi lebih baik fokus pada tugas domestik seperti memasak dan mencari suami, daripada terlibat dalam politik. Narasi ini menggambarkan betapa dalamnya kesenjangan gender yang ada dalam politik Indonesia, di mana perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang tidak mampu memimpin atau mengambil keputusan besar. Hal ini sangat relevan dengan situasi politik di Indonesia, di mana meskipun ada kebijakan kuota 30% untuk perempuan dalam legislatif, representasi perempuan dalam posisi kekuasaan tetap sangat terbatas (Ulfah & Widyantara, 2024).

Di dunia politik Indonesia, keterlibatan perempuan masih dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa, sementara dalam dunia patriarkal, posisi perempuan dalam politik sering kali terpinggirkan atau hanya sekadar menjadi pelengkap. Film ini mengkritik budaya patriarkal ini, menunjukkan bahwa Dewi, meskipun diragukan oleh banyak orang, akhirnya berhasil mengalahkan Panji dan terpilih sebagai wali kota. Ini menggambarkan

bagaimana film dapat menjadi medium untuk menantang norma sosial dan mendorong kesadaran akan pentingnya keberagaman gender dalam kepemimpinan politik.

Namun, meskipun karakter Dewi berhasil terpilih sebagai wali kota, film ini juga memperlihatkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna dalam sistem politik. Dewi sendiri merasa ragu dan tertekan, bahkan dalam beberapa adegan ia terlihat mempertimbangkan untuk lebih fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik daripada terlibat dalam dunia politik yang penuh manipulasi dan ketidakadilan. Ini mencerminkan ketegangan yang dirasakan banyak perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik tetapi sering kali dihadapkan pada hambatan struktural, baik itu dari dalam diri sendiri maupun dari sistem yang lebih besar.

Film ini juga menggambarkan politik dinasti di Indonesia, di mana jabatan politik sering kali diwariskan dalam keluarga yang sama, yang mereduksi prinsip demokrasi. Dinasti politik ini sering kali terjadi di tingkat lokal, di mana keluarga politik tertentu mengontrol banyak posisi pemerintahan, yang mengarah pada terjadinya ketidaksetaraan akses bagi calon pemimpin lainnya. Fenomena ini tercermin dalam pengumuman oleh Raja Puriwicara yang memilih anaknya, Reza, untuk menggantikan posisinya sebagai calon penerus kerajaan, sementara Dewi dan Panji harus "berkompetisi" dalam pemilihan yang lebih terbuka meskipun tetap berada dalam bayang-bayang kekuasaan sang Raja. Hal ini menggambarkan betapa dinasti politik masih mengakar dalam banyak sistem pemerintahan di Indonesia, terutama dalam pilkada (Rusnaedy, 2021).

Simpulan

Film *Kronik Puriwicara* berhasil menggabungkan fiksi dan realitas untuk menciptakan ruang refleksi kritis tentang kekuasaan, moralitas, dan dinamika politik di Indonesia. Dengan menggunakan setting kerajaan modern sebagai metafora, film ini menyampaikan isu-isu politik, seperti politik uang, manipulasi pemilihan, dan dominasi kekuasaan oleh keluarga atau kelompok tertentu, yang masih relevan dengan praktik politik Indonesia saat ini.

Melalui elemen musikal, film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai alat kritik sosial yang efektif. Musik dan lirik digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kekuasaan dan moralitas dengan cara yang emosional dan reflektif. Film ini juga menyoroti peran gender dalam politik, menggambarkan tantangan perempuan dalam memasuki arena politik yang didominasi oleh laki-laki, serta memperlihatkan bagaimana sistem patriarkal masih menghambat keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan.

Selain itu, *Kronik Puriwicara* menggambarkan fenomena politik dinasti yang mengurangi prinsip demokrasi dan menghalangi kesempatan calon pemimpin lainnya. Film ini mengajak penonton untuk merenung tentang ketidaksetaraan dalam politik lokal dan memperlihatkan bagaimana manipulasi kekuasaan dapat merusak integritas sistem demokrasi.

Fiksi sebagai Cermin Realitas: Eksperimen Hibrida dalam Film Kronik Puriwicara

Secara keseluruhan, film ini menyarankan bahwa seni film, ketika dipadukan dengan riset sosial-politik, dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan moral dan sosial, serta membangkitkan kesadaran kritis di kalangan audiens. Dengan demikian, film tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institusi Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta atas dukungannya dalam fasilitas dan kesempatan penelitian ini. Terima kasih juga kepada para dosen dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan, kritik, dan dorongan yang berharga sepanjang proses pembuatan film *Kronik Puriwicara*.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melalui berbagai laporan dan data telah memberikan referensi yang sangat relevan terkait praktik korupsi dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Terima kasih juga kepada peneliti dan ahli seni kontemporer yang telah memberikan pandangan dan teori tentang *research through art*, yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan teknis dan moral, serta semua yang telah membantu dalam pembuatan film *Kronik Puriwicara*.

Referensi

- Agung, L., & Syahdanendra, F. K. (2025). Homelander and the Ambiguity of Morality in the Television Series *The Boys*. *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 21(2), 91-104. <https://doi.org/10.24821/rekam.v21i2>
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.
- Fiske, J. (1990). *Introduction to communication studies* (2nd ed.). Routledge.
- Frayling, C. (1993). Research in art and design. *Royal College of Art Research Papers*, 1(1), 1-5. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/237587858_Research_in_Art_and_Design
- García Canclini, N. (1995). *Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity*. University of Minnesota Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, November 4). *51% kasus korupsi berasal dari daerah, pimpinan daerah harus tegakkan integritas*. Retrieved from

<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-51-kasus-korupsi-berasal-dari-daerah-pimpinan-daerah-harus-tegakkan-integritas>

- Mariana, D. (2017). Democracy, local election, and political dynasty in Indonesia. *Wacana Politik: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 93–104. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/13998>
- Rahmah, F. N., Sintowoko, D. A. W., & Maulana, T. A. (2025). Konstruksi Maskulinitas dalam Film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*. *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 21(2), 131-144. <https://doi.org/10.24821/rekam.v21i2>
- Rusnaedy, Z. (2021). Political dynasty and single candidate in Indonesian local elections. *Journal of Government and Law Perspective*, 1(2), 77–88. Retrieved from <https://journal.unpacti.ac.id/JGLP/article/view/297>
- Rusnianto, A. C. (2023). Musik sebagai media kritik sosial: Analisis lagu karya. Universitas Islam Negeri Jakarta. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33628/1/ANGKI%20C HANDRA%20RUSNIANTO%20-FDK.pdf>
- Santoso, B. (2025). Seni dan demokrasi: Pemanfaatan ruang publik sebagai media ekspresi sosial-politik. *Irama: Jurnal Seni dan Budaya*, 10(1), 45-60. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/irama/article/view/80314>
- Sullivan, G. (2005). *Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts*. Sage Publications.
- Lestari, N. (2025). Kajian tema sosial-politik dalam proyek Bodies of Power: Pendekatan research through art. *Jurnal Kajian Seni*, 15(2), 103-119.
- The Guardian. (2025, March 20). *Indonesia passes controversial law allowing greater military role in government*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2025/mar/20/indonesia-passes-controversial-law-allowing-greater-military-role-in-government>
- Ulfah, N., & colleagues. (2024). Women’s representation in political development in Indonesia: Examining gender discrimination and patriarchal culture. *ESIC: Economics, Social, and Institutional Change*, 8(2), 223–240. Retrieved from <https://esiculture.com/index.php/esiculture/article/download/683/126/792>

**Fiksi sebagai Cermin Realitas: Eksperimen Hibrida dalam
Film Kronik Puriwicara**